

ABSTRAK

Skripsi ini berupaya untuk mengkaji mengenai Fungsi Pengawasan yang diterapkan DPRD Komisi C dalam Program Kang PisMan (Kurangi , Pisahkan dan Manfaatkan) Sampah di Kota Bandung. Secara spesifik, tulisan ini mengkaji bagaimana Fungsi Pengawasan DPRD Komisi C dalam Program Kang PisMan yang dilakukan, dengan mengkaji efektivitas dan juga bagaimana proses fungsi pengawasan program ini.

Metode Penelitian pada penulisan skripsi ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif yang mana dalam mengumpulkan data menggunakan teknik penelitian kepustakaan, penelitian lapangan (wawancara, observasi dan dokumentasi). Peneliti melakukan wawancara dengan 4 Informan dan melakukan Penelitian Lapangan secara langsung di Kantor DPRD Kota Bandung terfokus pada Bagian Komisi C. Dalam menelaah lebih dalam penelitian ini, penulis menggunakan Teori Fungsi Pengawasan Sururama dan Amalia (2020 : 67).

Dari hasil analisa dengan berbagai data yang didapat konsep tersebut kemudian dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Fungsi Pengawasan DPRD Komisi C dalam Program Kang PisMan belum berjalan dengan baik, yang mana dilihat dari 4 dimensi Sururama dan Amalia (2020:67). Hasil analisa penelitian ini yang peneliti simpulkan bahwa dalam Fungsi Pengawasan DPRD Komisi C terdapat beberapa kesalahan dan penyimpangan pada Program Kang PisMan harus diperbaiki agar program kang PisMan berjalan dengan baik dilihat dari jadwal pengawasan rutin yang belum dilakukan dalam peninjauan langsung dan Ketersediaan kebijakan sanksi yang belum ditegaskan dalam program Kang PisMan, Mempertinggi rasa tanggung jawab dilihat dari Frekuensi laporan kinerja DPRD Komisi C belum membuat ketetapan laporan kinerja dari pihak-pihak terkait baik dinas,RW/kelurahan 3 bulan sekali Kepada DPRD untuk Program Kang PisMan, Sistem penilaian kinerja DPRD Komisi C belum menetapkan *Key Perfomenace indicators* dalam Program Kang PisMan. Menjadikan organisasi dan semua aktivitas manajemen dinamis dilihat dari Adaptabilitas terhadap perubahan DPRD Komisi C belum meminta DLHK membuat SOP yang fleksibel dan bisa direvisi cepat dan Pengembangan Kapasitas Sumber daya manusia DPRD Komisi C belum meminta laporan kinerja SDM di lapangan. Tujuan Organisasi akan bisa tercapai dilihat dari Pencapaian target kerja DPRD Komisi C belum melakukan pemantauan setiap level pelaksanaan mulai RW, Kelurahan hingga kecamatan dan Frekuensi Evaluasi DPRD Komisi C dalam evaluasi belum melibatkan stakeholder secara langsung bukan hanya pejabat dinas akan tetapi RW, Komunitas Lingkungan, Akademisi Lokal diperlukan dalam Evaluasi Program Kang PisMan.

Kata Kunci : Fungsi Pengawasan, DPRD Komisi C Kota Bandung , Program Kang PisMan, Efektivitas Pengawasan